

Ternyata Ganjar Gunakan Calo

Biaya untuk Calo		
■ BPBD Jateng	Rp	11.291.825
■ Sekretariat Daerah	Rp	51.395.000
■ Sekretariat DPRD	Rp	10.635.000
■ Dinas Sosial	Rp	9.048.900
■ RSUD Kelet	Rp	6.620.000
■ Kantor Perwakilan	Rp	7.800.000
■ Disnakertrans	Rp	7.775.600
■ Dan lain-lain		



Bayar Pajak STNK

SEMARANG—Sungguh ironis. Janji Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran negara, ternyata dilanggarnya sendiri. Lihat saja, selama tahun 2014, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Jateng justru menggunakan calo/biro jasa saat membayar pajak STNK.

Demikian diungkapkan Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Muhammad Rofiuddin, Rabu (17/6). "Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selalu mendengung-dengungkan pemberantasan praktik calo dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Tapi, selama 2014 SKPD yang merupakan jajaran Gubernur Jateng justru menggunakan biro jasa saat membayar pajak STNK," ungkapnya, dalam rilisnya kepada

■ Baca TERNYATA .hal 7

Ternyata Ganjar

Jateng Pos, kemarin.

Menurut dia, hal itu bertolak belakang dengan janjinya sendiri. Padahal, Ganjar yang mulai menjabat Gubernur Jateng sejak Agustus 2013 selalu berjanji untuk efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran negara.

Fakta itu diketahui sesuai dengan hasil audit BPK atas LPJ Keuangan Pemprov Jateng 2014 yang menemukan jajaran Ganjar Pranowo atau SKPD-SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah justru menggunakan biro jasa untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Biro jasa adalah istilah halus/bahasa lain untuk menyebut praktik calo. Tak tanggung-tanggung, biaya biro jasa pembayaran pajak kendaraan mencapai Rp136 juta," bebarnya.

Biaya jasa pengurusan tersebut berupa fee biro jasa dan biaya lain-lain yang diperlukan saat melakukan pembayaran STNK kendaraan dinas Pemprov Jateng. Rincian masing-masing SKPD mengeluarkan biaya ke calo untuk mengurus pembayaran pajak sangat bervariasi.

Misalnya, BPBD Jateng Rp11.291.825; Sekretariat Daerah Rp51.395.000; Sekretariat DPRD Rp 10.635.000; Dinas Sosial Rp9.048.900; RSUD Kelet Rp6.620.000, Kantor Perwakilan Rp7.800.000, Disnakertrans Rp7.775.600, dll.

Menurut hasil audit BPK, dari

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selalu mendengung-dengungkan pemberantasan praktik calo dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Tapi, selama 2014 SKPD yang merupakan jajaran Gubernur Jateng justru menggunakan biro jasa saat membayar pajak STNK

M ROFIUDDIN
Koordinator KP2KKN

Rp136 juta tersebut, beberapa SKPD sudah mengembalikan ke kas daerah sebesar Rp127 juta. Misalnya, Sekretariat Daerah sudah mengembalikan ke kas daerah Rp51 juta pada 28 Mei lalu.

BPK meminta agar ada pertanggungjawaban indikasi kerugian negara Rp9,2 juta dengan menyetorkan ke kas daerah. Dalam APBD 2014, anggaran untuk belanja pajak kendaraan bermotor (STNK) Rp1,7 miliar dengan realisasi Rp1,2 miliar.

Selain mempersoalkan pembayaran ke biro jasa, menurut Rofiudin, BPK juga menemukan bukti pembayaran KIR Rp49 juta yang belum didukung dengan bukti yang memadai. "Seharusnya, SKPD-SKPD itu tak menggu-

nakan jasa calo untuk membayar pajak kendaraan. SKPD yang sudah memiliki banyak pegawai harusnya bisa mengurus pembayaran kendaraan secara sendiri agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara," katanya.

Apalagi, Ganjar yang menjabat Gubernur Jateng sejak Agustus 2013 sudah berjanji untuk efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran negara. "Tapi, di tahun 2014 kok bisa-bisanya ada pengeluaran anggaran untuk calo saat membayar pajak kendaraan. BPK juga sudah menyatakan pembayaran ke calo sebesar Rp136 juta tersebut ada indikasi kerugian daerah," ujarnya. "Janji Ganjar memberantas calo ternyata tak diikuti jajarannya sendiri," imbuhnya.

Ganjar pernah menyatakan akan melegalkan praktik calo menjadi biro jasa. Caranya, kata Ganjar, praktik biro jasa ini harus terdaftar dengan tarif resmi yang terbuka. Tapi, hingga kini publik belum pernah mendengar adanya sistem praktik biro jasa yang terdaftar dan tarif resminya di tempat-tempat pelayanan publik, seperti Samsat dan Imigrasi.

Program Ganjar membayar pajak kendaraan melalui ATM juga belum efektif. Kita lihat saja di Kantor Samsat Hanoman Semarang, mesin ATM sering tak digunakan pembayar pajak. (udi/bow)

dari hal 1